

Firyal Nabihah

Analisis Legislatif Ahli Pertama
firyal.nabihah@dpr.go.id

Sri Nurhayati Qodriyatun

Analisis Legislatif Ahli Madya
sri.qodriyatun@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kematian massal sekitar 100 ton ikan terjadi di Waduk Jatiluhur, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sebagian besar ikan yang mati adalah ikan mas, yang merupakan komoditas unggulan budi daya di wilayah tersebut. Dengan asumsi harga ikan mas sekitar Rp22 ribu per kilogram, total kerugian diperkirakan mencapai Rp2,2 miliar. Insiden ini terjadi di Kampung Pasir Kole, Desa Kutamanah, Kecamatan Sukasari, dan Kampung Citerbang, Desa Panyindangan, Kecamatan Sukatani. Peristiwa ini mulai ramai diberitakan pada 7 Februari 2025, setelah kematian ikan secara massal tercatat sejak 6 Februari 2025. KKP melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya segera menurunkan tim yang bekerja sama dengan Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi dan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purwakarta. Investigasi awal menunjukkan kematian ikan massal terjadi di zona 2 Citerbang, sedangkan di wilayah lain masih aman berkat upaya pencegahan yang dilakukan.

Fenomena kematian massal ikan di Waduk Jatiluhur diduga kuat dipicu oleh cuaca ekstrem yang memicu fenomena *upwelling*. *Upwelling* merupakan proses naiknya air dingin dari dasar waduk ke permukaan akibat pergerakan angin yang kuat. Kondisi ini menyebabkan penurunan pasokan oksigen terlarut (O_2) di perairan, yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup ikan mas. Ikan mas diketahui sangat bergantung pada kestabilan pasokan oksigen terlarut, sehingga ketika terjadi penurunan oksigen secara drastis, ikan mengalami stres dan akhirnya mati. Selain faktor alam, penggunaan Keramba Jaring Apung (KJA) yang tidak sesuai standar dan melebihi kapasitas juga diduga menjadi penyebab memburuknya kualitas air di waduk tersebut. Hal ini dikarenakan sisa pakan dan kotoran ikan yang menumpuk di dasar perairan meningkatkan kadar amonia dan menurunkan oksigen terlarut, yang dapat mencemari dan mengganggu ekosistem air. Meskipun para pembudidaya sudah mendapat peringatan mengenai bahaya cuaca ekstrem, banyak dari mereka yang tetap menahan panen untuk mendapatkan ukuran ikan yang lebih besar, sehingga meningkatkan risiko kematian massal.

Kematian massal 100 ton ikan ini tidak hanya merugikan secara ekonomi bagi para pembudidaya, tetapi juga berdampak serius pada kualitas ekosistem perairan dan kehidupan sosial masyarakat sekitar. Dari segi ekonomi, kerugian diperkirakan mencapai Rp2,2 miliar dengan asumsi harga ikan mas sekitar Rp22.000 per kilogram, yang menghancurkan sumber pendapatan utama para pembudidaya ikan dan mengganggu keberlangsungan ekonomi keluarga mereka. Secara lingkungan, kematian ikan dalam jumlah besar ini meningkatkan kadar bahan organik di perairan secara signifikan, yang selanjutnya mempercepat proses dekomposisi dan meningkatkan konsumsi oksigen oleh bakteri pengurai. Selain itu, pembusukan bangkai ikan menghasilkan senyawa beracun seperti amonia dan hidrogen sulfida yang dapat mencemari air dan berdampak buruk pada kesehatan masyarakat sekitar yang bergantung pada waduk sebagai sumber air. Dari sisi sosial, peristiwa ini tidak hanya mengakibatkan hilangnya mata pencaharian para pembudidaya ikan, tetapi juga memicu keresahan di kalangan masyarakat yang khawatir akan dampak pencemaran terhadap kesehatan dan ketersediaan air bersih.

Untuk mengatasi situasi ini, KKP memberikan beberapa rekomendasi strategis. *Pertama*, KKP menyarankan agar pembudidaya segera mengangkat dan mengubur bangkai ikan untuk mencegah pencemaran lebih lanjut. *Kedua*, KKP merekomendasikan penghentian sementara aktivitas budi daya di Waduk Jatiluhur hingga kondisi perairan stabil dan cuaca kembali normal. *Ketiga*, pembudidaya diimbau untuk tidak menggunakan KJA secara berlebihan dan mengikuti kapasitas serta zonasi yang telah ditentukan. Selain itu, KKP terus mengingatkan pentingnya melakukan panen lebih awal saat cuaca ekstrem terdeteksi untuk meminimalkan risiko kematian ikan secara massal. KKP akan memperkuat sistem peringatan dini terkait cuaca ekstrem dan kualitas air, memperketat pengawasan penggunaan KJA di waduk-waduk besar di Indonesia, serta meningkatkan pelatihan dan pendampingan kepada pembudidaya untuk memastikan keberlanjutan budi daya ikan yang ramah lingkungan. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menekankan pentingnya keberlanjutan ekologi dalam setiap aktivitas budi daya agar kejadian kematian ikan massal dapat dicegah dan keberlangsungan ekonomi serta ekosistem perairan tetap terjaga.

Atensi DPR

Kematian massal ikan di Waduk Jatiluhur memerlukan perhatian serius untuk mencegah dampak ekonomi dan lingkungan yang lebih luas. Komisi IV DPR RI berperan penting dalam mengawasi langkah penanganan oleh KKP. Pengawasan perlu memastikan investigasi penyebab kematian ikan dilakukan secara transparan dan komprehensif. Komisi IV juga perlu mendorong KKP memperkuat sistem peringatan dini serta mengatur penggunaan KJA yang lebih terkendali. Pengaturan ini meliputi pembatasan jumlah KJA per wilayah dan penerapan teknologi budidaya yang ramah lingkungan untuk menjaga ekosistem perairan dan keberlanjutan ekonomi pembudidaya.

Sumber

antaranews.com, 10 Februari 2025;
kompas.com, 12 Februari 2025;
mediaindonesia.com, 11 Februari 2025;
pikiran-rakyat.com, 12 Februari 2025;
republika.co.id, 10 Februari 2025; dan
tribunnews.com, 13 Februari 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making